



Berhalangan Hadir, Anggota DPRD Harus Kembalikan Biaya Orientasi

Cornelis: Agar Tidak Menjadi Temuan BPK



Cornelis

PONTIANAK-RK. Gubernur Kalbar, Cornelis secara tegas meminta kepada anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalbar periode 2014-2019 yang berhalangan hadir untuk mengembalikan biaya orientasi. Orang nomor satu di Kalbar ini juga mengingatkan jika ketidakhadiran tanpa alasan jelas, bisa dilaporkan ke ketua partai yang bersangkutan di Jakarta.

"Biaya orientasi anggota DPRD

yang tidak hadir orientasi harus dikembalikan agar tidak menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tegas Cornelis saat menutup orientasi anggota DPRD Kabupaten Mempawah dan Landak periode 2014-2019 di Mahkota Hotel Pontianak, Sabtu (22/11).

Gubernur mengingatkan, orientasi tugas ini sangat penting bagi anggota DPRD. Karena sebagai pedoman untuk bekerja selama lima tahun yang akan datang, terutama bagaimana menyusun APBD, bekerjasama dengan eksekutif dalam membangun daerah masing-masing.

Apalagi, dikatakan Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini, tugas DPRD semakin berat. Ia pun berharap agar para wakil rakyat di Kalbar tidak terpengaruh dengan situasi DPR RI saat ini. "Pikirkan kepentingan rakyat, kita segera bekerja," ujar Gubernur.

Cornelis juga meminta agar kabupaten yang belum menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar segera dituntaskan, sehingga pemba-

hasan RAPBD tahun anggaran 2015 tidak terlambat. "Jaga juga komunikasi dengan konstituen," katanya.

Berdasarkan Data Panitia Penyelenggara Orientasi dari Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalbar, orientasi anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat dilaksanakan tujuh angkatan, dimulai 27 Oktober-28 November 2014.

Adapun materi yang disampaikan pada pelaksanaan orientasi itu yakni dinamika kelompok, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, demokrasi dan wawasan kebangsaan, sistem pemerintahan Indonesia, kepemimpinan dan etika pemerintahan.

Kemudian, wewenang, tugas, fungsi dan tata tertib DPRD. Menjaga hubungan DPRD dan Pemda, membentuk peraturan daerah, perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan pemda, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Laporan: Abelnus dan Hendrikus Humas Pemprov Kalbar
Editor: Julianus Ratno